

PERAN AKTOR DALAM PERCEPATAN PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Minda Putri Carolina *¹

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
minda.putri5494@student.unri.ac.id

Mayarni Mayarni

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
mayarni@lecture.unri.ac.id

Abstract

The People's Palm Oil Replanting Program (PSR) is an initiative to promote the development of community plantations, including government support in the form of investment credit and interest subsidies. This research focuses on the actors' roles in accelerating the implementation of the People's Palm Oil Replanting Program in the Indragiri Hilir Regency. This study aims to understand the functions of each party involved and the inhibiting factors in accelerating the People's Palm Oil Replanting Program in the Indragiri Hilir Regency. The research method used is qualitative, descriptive research employing Blackman's theory (2003), which consists of four variables: Informants, Consultants, Cooperation, and Control. The findings reveal that the roles of the actors are not yet optimal, there is a lack of found partners to assist farmer groups, and limitations in knowledge, funding, and inadequate infrastructure are inhibiting factors in accelerating the People's Palm Oil Replanting Program in the Indragiri Hilir Regency. This research suggests that the involved actors are expected to be more optimal in their respective roles.

Keywords: People's Palm Oil Replanting Program (PSR), Acceleration, Program, Roles, and Actors.

Abstrak

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan inisiatif untuk mendorong pengembangan perkebunan rakyat yang mencakup dukungan kredit investasi dan subsidi bunga dari pemerintah. Penelitian ini berfokus pada peran aktor yang terlibat dalam percepatan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran masing-masing pihak yang terlibat dan faktor penghambat dalam percepatan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan teori Blackman (2003) yang memiliki 4 variabel yaitu, Informan, Konsultan, Kerjasama dan Kontrol. Hasil penelitian menemukan bahwa peran aktor belum optimal, belum ditemukannya mitra yang dapat membantu kelompok tani serta adanya keterbatasan pengetahuan, keterbatasan dana dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi faktor penghambat percepatan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. Saran dari penelitian ini adalah para aktor yang terlibat diharapkan untuk lebih optimal lagi dalam perannya masing-masing.

Kata Kunci: Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Percepatan, Program, Peran dan Aktor.

¹ Korespondensi Penulis.

PENDAHULUAN

Kelapa sawit didefinisikan sebagai salah satu produk yang saat ini sedang dikembangkan karena memiliki peran yang begitu penting dalam menunjang pendapatan masyarakat. Kelapa sawit juga memiliki peluang pasar yang baik di pasar dalam negeri ataupun luar negeri (ekspor), berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dan juga berperan untuk menjaga kegunaan lingkungan hidup. Namun seiring berjalannya waktu dalam pengembangan kelapa sawit, beberapa wilayah pengembangan sudah sampai pada titik dimana diperlukan penanaman kembali atau *replanting*. Namun faktor yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan kurangnya pendapatan pada masa tanam muda serta mahalnya biaya pelaksanaan proses peremajaan tersebut (Gunawan, 2019).

Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas yaitu Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan inisiatif yang bertujuan mendorong pengembangan perkebunan rakyat yang termasuk dukungan modal investasi dan subsidi bunga dari pemerintah, serta dukungan program yang melibatkan kerjasama dengan perusahaan perkebunan dalam upaya pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasilnya. Program ini memiliki tujuan untuk menambah kesempatan bekerja dan penghasilan bagi masyarakat melalui perluasan lahan perkebunan, peningkatan daya persaingan melalui pengembangan industri sekunder perkebunan serta peningkatan produktivitas perkebunan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperkuat kepemilikan perekonomian nasional dengan melibatkan masyarakat lokal dan dunia usaha lokal untuk mendukung pembangunan daerah. (Gunawan, 2019).

Produsen kelapa sawit serius dalam mempertahankan perkebunan kelapa sawitnya, namun timbul kesulitan terkait biaya rehabilitasi kelapa sawit yang membutuhkan modal besar. Kendala biaya ini menjadi kendala bagi sebagian produsen kelapa sawit sehingga menimbulkan penolakan terhadap penanaman kembali. Biaya rehabilitasi yang dimaksud adalah biaya perawatan perkebunan kelapa sawit setelah tahap penanaman seperti tahap pemupukan. Karena tidak semua petani mempunyai kebun lebih dari satu, tabungan cukup atau pekerjaan lain, mereka merasa kesulitan. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan menjamin keberhasilan program peremajaan kelapa sawit rakyat, pemerintah harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan setempat dan organisasi masyarakat, seperti koperasi, kelompok tani, dan organisasi lainnya. Selain itu, keikutsertaan perusahaan sebagai mitra merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh kelompok tani atau kelompok sasaran. Karena berdasarkan fakta yang ada, dana yang diperoleh oleh kelompok tani untuk setiap hektar lahan yang mereka punya dinilai tidak mencukupi, sehingga hal ini dapat menjadi penghambat percepatan program peremajaan sawit rakyat tersebut. Aulifa (2019).

Tabel 1.1 Perkembangan PSR Di Kabupaten Indragiri Hilir 2017-2022

Tahun	Target (Ha)	Realisasi			
		Luas (Ha)	Kelembagaan (Unit)	Pekebun (Orang)	% Terhadap Target
2017	-	-	-	-	0%
2018	-	-	-	-	0%
2019	-	-	-	-	0%
2020	1.000	-	-	-	0%
2021	2.000	155.4123	-	82	8%
2022	500	-	-	-	0%

Tahun	Target (Ha)	Realisasi			
		Luas (Ha)	Kelembagaan (Unit)	Pekebun (Orang)	% Terhadap Target
Total	3.500	155.4123	-	82	8%

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2023

Realisasi program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 tercatat 0%. Berbeda dengan tahun 2021, Kabupaten Indragiri Hilir berhasil merealisasikan peremajaan sawit rakyat (*replanting*) yaitu 8% namun hal ini masih tergolong tingkat pencapaian keberhasilan rendah, hal ini tentunya dipengaruhi oleh petani yang tidak memiliki mitra. Kegagalan yang terjadi pada tahun 2022 juga disebabkan karena petani termasuk kepada petani swadya yang tidak memiliki mitra. Selain itu, Kabupaten Indragiri memiliki kelompok tani dengan mayoritas golongan petani marginal atau petani yang memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Menurut Aulifa (2019), mengatakan bahwa produsen kelapa sawit serius dalam mempertahankan perkebunan kelapa sawitnya, namun timbul kesulitan terkait biaya rehabilitasi kelapa sawit yang membutuhkan modal besar. Kendala biaya ini menjadi kendala bagi sebagian produsen kelapa sawit sehingga menimbulkan penolakan terhadap penanaman kembali. Biaya rehabilitasi yang dimaksud adalah biaya perawatan perkebunan kelapa sawit setelah tahap penanaman seperti tahap pemupukan. Karena tidak semua petani mempunyai kebun lebih dari satu, tabungan cukup atau pekerjaan lain, mereka merasa kesulitan. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan menjamin keberhasilan program peremajaan kelapa sawit rakyat, pemerintah harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan setempat dan organisasi masyarakat, seperti koperasi, kelompok tani, dan organisasi lainnya. Selain itu, keikutsertaan perusahaan sebagai mitra merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh kelompok tani atau kelompok sasaran. Karena berdasarkan fakta yang ada, dana yang diperoleh oleh kelompok tani untuk setiap hektar lahan yang mereka punya dinilai tidak mencukupi, sehingga hal ini dapat menjadi penghambat percepatan program peremajaan sawit rakyat tersebut.

Eksisting aktor yang terlibat dalam peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Pemerintah :

1. Disbun Provinsi Riau
2. Disbun Kabupaten Indragiri Hilir
3. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia / APKASINDO

Pemerintah memiliki tanggung jawab/wewenang sebagai berikut :

- a) Pemerintah mempunyai tanggung jawab membantu petani mengembangkan pemikiran dan cara kerja untuk meningkatkan usaha pertanian. Selain itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan dan memperkuat kelembagaan pertanian agar mampu mandiri dan bersaing secara efektif.
- b) Menjamin kesadaran mengenai peremajaan kelapa sawit di kalangan poktan, gapoktan, koperasi atau organisasi produsen lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
- c) Melakukan verifikasi catatan dan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan peremajaan kelapa sawit yang diajukan oleh Poktan/Gapokta.

Akademisi :

1. Dosen Ilmu Administrasi Publik

Akademisi memiliki tanggung jawab/ wewenang sebagai berikut:

- a) Sebagai ilmuwan, tugas guru melibatkan pengembangan suatu disiplin ilmu atau teknologi melalui penelitian ilmiah dan teori, serta menyebarkan hasilnya.

Masyarakat (Petani/Pekebun/ Poktan/ Gapoktan)

1. Kelompok tani berkah tani sejahtera

Masyarakat memiliki tanggung jawab/ wewenang sebagai berikut:

- a) Berhak mengusulkan peremajaan pohon kelapa sawit kepada Departemen Umum Kehutanan.

Terdapat beberapa fenomena yang peneliti temukan, yaitu :

1. Petani merupakan petani swadaya yang tidak memiliki mitra, sehingga hal ini dapat menjadi masalah dalam percepatan program peremajaan sawit rakyat. Petani swadaya dan tidak memiliki mitra ataupun kerjasama, kelompok tani hanya mendapat bantuan dari BPDPKS sebesar 30 Juta/Ha. Biaya melalui BPDPKS tentunya tidak akan mencukupi untuk pelaksanaan program sawit rakyat sampai menghasilkan.
2. Petani juga masih tergolong petani marjinal, petani marjinal akan banyak menolak program peremajaan sawit rakyat, karena kebutuhan sehari-hari saja masih belum dapat terpenuhi secara optimal, bagaimana jika lahan mereka digunakan untuk program peremajaan sawit rakyat, hal ini tentunya akan menyulitkan perekonomian petani sampai program peremajaan sawit rakyat dinyatakan berhasil. Keberhasilan program peremajaan sawit rakyat memiliki rentang waktu 4-5 tahun. Rentang waktu tersebutlah yang membuat kelompok tani berpikir dua kali untuk ikut serta dalam program peremajaan sawit rakyat.
3. Tidak optimalnya penyebaran informasi melalui media berupa pentingnya program Peremajaan Sawit Rakyat kepada masyarakat, sehingga masyarakat enggan untuk setuju dan mengikuti program peremajaan sawit rakyat.

Wilayah Indragiri Hilir menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat, seperti petani merupakan petani swadaya yang tidak memiliki mitra dan hanya memiliki dana 30jt/ha, dinilai tidak akan mencukupi untuk pelaksanaan program sawit rakyat sampai menghasilkan dan petani juga masih tergolong petani marjinal, petani marjinal akan banyak menolak program peremajaan sawit rakyat, karena kebutuhan sehari-hari saja masih belum dapat terpenuhi secara optimal. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktor dalam percepatan program peremajaan sawit di Kabupaten Indragiri Hilir dan faktor penghambat percepatan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari pengamatan secara mendalam atau observasi, wawancara serta telaah dokumen. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan dari bulan Agustus-November tahun 2023. Lokasi penelitian ini berada di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling*. Adapun teknikanalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menganalisis komponen ini, dapat digambarkan bagaimana setiap aktor

memainkan power-nya dalam mengimplementasikan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi pendalaman dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran eksisting aktor dalam program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Pemerintah Daerah Provinsi

Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Dinas Perkebunan Provinsi Riau memegang kewenangan untuk penyusunan program perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinator pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan pelaporan bidang perkebunan terkait program peremajaan sawit rakyat.

Selain itu, peran Dinas Perkebunan Provinsi Riau yaitu menetapkan program kebijakan, pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasi pemberian bimbingan teknis kepada kelompok sasaran terkait program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan dalam penelitian ini, Dinas perkebunan provinsi Riau berperan sebagai informan.

“Kami dari dinas perkebunan provinsi riau sangat mendukung adanya program peremajaan sawit ini, karena yang sama-sama kita tahu bahwa provinsi riau merupakan provinsi yang memiliki komoditas utama yaitu perkebunan kelapa sawit. Sehingga untuk terus meningkatkan produktivitas kelapa sawit dibutuhkan peremajaan kelapa sawit ini. Sebagai salah satu bentuk dukungan kami terhadap program ini, yaitu dengan membantu kelompok tani untuk mengurus perlengkapan administrasi mereka untuk pencairan dana dari BPDPKS. Namun yang mengerjakan dan melengkapi syarat-syarat tersebut tetaplah petani, kami hanya membantu mengarahkan saja. Selain itu kami juga telah melakukan sosialisasi program peremajaan sawit rakyat ini.” (Kabid Produksi Perkebunan Provinsi Riau, 10 Oktober 2023).

2. Pemerintah Daerah Kabupaten

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memegang kekuasaan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perkebunan, pengembangan perkebunan melalui program peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana serta pelaksanaan penyuluhan perkebunan.

Membantu dinas perkebunan provinsi melaksanakan pemerintahan dibidang perkebunan, pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui program peremajaan sawit rakyat, mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pekebun serta melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berperan sebagai informan, konsultan, kerjasama dan kontrol.

“Kami dari dinas perkebunan kabupaten Indragiri Hilir memiliki fungsi, wewenang dan tanggung jawab terhadap kelompok tani yang ingin mengajukan dana untuk ikut program peremajaan sawit rakyat di kabupaten Indragiri Hilir. Kami juga memiliki wewenang untuk menunjuk petugas pendamping untuk kelompok petani dalam melengkapi persyaratan pengajuan dana PSR. Adapun fungsi, wewenang dan tanggung jawab kami untuk membantu para kelompok tani seperti mengumpulkan kelengkapan dokumen untuk psr, setelah lengkap di input di sistem oleh kelompok tani dengan pendampingan dari disbun kab, petani menyiapkan dokumen dan membuat akun psr online kemudian menginput data, disbund menunjuk verifikator dan pengecekan kelembagaan, badan hukum dan lahan sawit (bukan lahan kosong dan bukan kawasan hutan, kawasan hidrologis udah dihapus), verifikator bekerja sama dengan instansi lain badan pertanahan nasional, terkait dengan hak guna usaha dan kementerian lingkungan hidup kehutanan untuk melihat dan membuat keterangan resmi (survei lapangan, dokumen kepemilikan lahan, keabsahan kelompok tani, lahan sengketa atau tidak). Selain itu kami juga akan memberikan solusi apabila petani mengalami kendala. Kemudian kami juga membantu petani dalam hal meminjamkan alat GPS untuk koordinat lahan dan juga kami melakukan kontrol lapangan untuk melihat keadaan para kelompok tani secara langsung.

APLIKASI PSR ONLINE

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyediakan sebuah aplikasi untuk mendukung program **Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)**. Aplikasi ini diluncurkan untuk mempercepat program PSR sehingga pemrosesan data bisa lebih cepat dilaksanakan dan petani bisa lebih cepat menerima dana bantuan dana dari BPDPKS.



Gambar 1 Tampilan Halaman Depan Aplikasi PSR *Online*

Sumber : www.bpdः.or.id

Selain itu adapun faktor penghambat program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu peremajaan sawit rakyat (PSR) dibantu pemerintah hanya di bantu 30 jt/ha. Sehingga dana tersebut hanya cukup untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemupukan pertama. Dana 30jt/ha bisa dikatakan sangat terbatas untuk melaksanakan program PSR, karena dana tersebut tidak mencukupi hingga tahap pemupukan selanjutnya dan sampai tahap panen.” (Koordinator Penyuluhan Program Peremajaan Sawit Rakyat Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, 17 Oktober 2023).

3. Asosiasi

Asosiasi Petani Kelapa Sawit (DPD Apkasindo) Kabupaten Indragiri Hilir.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit (DPD Apkasindo) Kabupaten Indragiri Hilir memegang kekuasaan mendampingi petani dan membentuk agar petani menjadi petani mandiri dalam mengembangkan usaha tani (produksi, pengolahan dan pemasaran), memfasilitasi dukungan kebijakan dari instansi pemerintah secara transparan kepada petani di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan memberikan pengawasan kepada kelompok tani dalam percepatan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Membantu dan mendampingi kelompok tani dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. Pihak asosiasi juga berperan membantu petani menjadi petani mandiri dalam melaksanakan program peremajaan sawit rakyat dan memberikan pengawasan kepada kelompok tani dan dapat menjadi pemberi solusi ketika kelompok tani mengalami kendala atau hambatan selama melaksanakan program peremajaan sawit rakyat di

Kabupaten Indragiri Hilir. Pihak Asosiasi memiliki peran sebagai informan, konsultan, kerjasama dan kontrol.

“Pihak Apkasindo tugasnya hanya mendampingi petani yang sudah memiliki kelompok tani. Karena jika tidak dalam bentuk kelompok tani, maka petani tidak bisa mendaftarkan untuk program peremajaan sawit rakyat ini sampai mendapatkan dana dari BPDPKS. Dan kelompok tani harus memiliki SK dari direktorat jenderal perkebunan dulu. Kelompok tani membentuk sendiri kelompok mereka dan pihak apkasindo tidak memiliki wewenang untuk membentuk kelompok tani. Setelah itu dalam hal memenuhi persyaratan administrasi juga di lengkapi oleh kelompok tani sendiri, mulai dari mempersiapkan berkas sampai upload berkas ke aplikasi PSR online. (Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Indragiri Hilir, 2 November 2023).

4. Pemerintah Desa

Kepala Desa Harapan Jaya

Kepala desa memegang kekuasaan penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketertiban dan ketentraman, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah desa.

Kepala Desa Harapan Jaya memiliki peran membina, mendampingi kelompok tani dalam proses kelompok tani ikut serta dan melaksanakan program peremajaan sawit rakyat. Selain itu kepala desa merupakan aktor atau pihak terdekat dengan kelompok tani, sehingga dalam hal ini, kepala desa juga memberikan arahan ataupun solusi kepada kelompok tani apabila mereka mengalami kendala ataupun hambatan. Selain itu, kepala desa juga mengawasi kelompok tani dalam program peremajaan sawit rakyat ini. Dalam penelitian ini, kepala desa memiliki peran sebagai informan, konsultan dan kontrol.

“Ketika petani mengalami kendala, biasanya petani yang diwakili oleh ketua kelompok taninya, tentunya akan melapor ke desa karena kami merupakan bagian pemerintah daerah yang sangat dekat dengan petani. Namun jika kendalanya tidak dapat diselesaikan dalam lingkup desa, biasanya ketua kelompok tani akan memberitahukan kepada pihak Apkasindo atau dinas perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas perkebunan dan Apkasindo biasanya berkolaborasi atau bersama-sama membuat sebuah forum, yang nantinya akan duduk bersama petani untuk membicarakan masalah kendala itu dan akan diberikan solusi terkait masalah yang sedang dihadapi oleh petani. Selain itu kami dari pihak desa pun yang merupakan pihak terdekat dengan petani juga melakukan kontrol berupa selalu mencari trobosan atau cara terbaru agar program peremajaan sawit rakyat bisa berhasil. Pada awal penggunaan Aplikasi PSR online, petani masih sangat minim pengetahuan tentang penggunaan aplikasi tersebut. Karena PSR online ini muncul setelah 2 tahun program PSR dilaksanakan, yang mana 2 tahun sejak dilaksanakannya program PSR ini, petani melengkapi berkas-berkas administrasi mereka secara manual. Sehingga ini menjadi faktor penghambat PSR itu sendiri di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, karena Indragiri Hilir sebagian besar akses jalan harus melalui sungai, sehingga tandan buah segar harus diangkut pakai perahu dan ada pengurangan pendapatan karena petani harus membayar uang sewa perahu, karena perahu tersebut bukanlah hak milik petani karena hanya beberapa petani yang memiliki perahu saja, namun mayoritas petani tidak memiliki perahu. Sehingga apabila petani telah mendapatkan hasil dari penjualan kelapa sawit mereka, petani harus mengurangkan lagi dengan biaya sewa perahu tersebut. Petani sawit menggunakan dana dari bpdpks dan tidak ada pihak lain setelah proses penanaman dana habis, petani akan merawat lahan mereka sendiri. (Kepala desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling, 18 Oktober 2023).

5. Akademisi

Dosen Ilmu Administrasi Publik

Akademisi memegang kewenangan sebagai ilmuwan, tugas akademisi melibatkan pengembangan suatu disiplin ilmu atau teknologi melalui penelitian ilmiah dan teori, serta menyebarkan hasilnya.

Dosen ilmu administrasi publik memiliki peranan sebagai aktor yang melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan peremajaan sawit rakyat, yang mana, penelitian ilmiah tersebut akan disebarluaskan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat di masa depan. Dalam penelitian ini, aktor akademisi memiliki peran sebagai informan.

“Dosen memiliki tri dharma yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Nah penelitian yang dilakukan oleh dosen tentunya memiliki harapan agar kebijakan ataupun program yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan maksimal dan tercapainya suatu tujuan. Selain masyarakat menjadi objek/subjek, sudah seharusnya keinginan dari masyarakat di dengar. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh dosen biasanya akan mendengarkan keinginan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Luaran hasil penelitian dosen dalam suatu penelitian dapat berupa policy brief atau rekomendasi kebijakan. Tujuan adanya policy brief diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan selanjutnya, agar apa-apa yang dianggap kurang baik dapat diperbaiki.” (Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau, 24 Oktober 2023).

6. Kelompok Sasaran

Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera

Kelompok tani memiliki wewenang yaitu, berhak mengusulkan peremajaan pohon kelapa sawit kepada Departemen Umum Kehutanan. Kelompok tani yang dalam penelitian ini termasuk kelompok sasaran yang memiliki peranan untuk mengusulkan peremajaan sawit rakyat kepada direktorat jenderal perkebunan sehingga memperoleh dana program melalui BPDPKS sebesar 30 Jt/Ha. Dalam penelitian ini, kelompok tani memiliki peran sebagai informan.

“Harapannya petani/ kelompok tani, supaya ada pihak yang bisa meminjamkan anggaran untuk perawatan p1-p3. p1 misalnya tanaman belum menghasilkan (tbm) tahun pertama hingga tahun ketiga. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan karena terkendala, pada akhirnya petani merawat sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pihak 39 petani kebanyakan memiliki beberapa hektar dan hanya setengah hektar yang diikutsertakan psr. Indragiri Hilir melakukan psr karena bibit tidak bagus, jadi saat usia produktif masih panjang tetap melakukan psr untuk berkelanjutan.” (Ketua Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera, 18 Oktober 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Informasi yang ditemukan dalam penelitian ini sudah optimal dan cukup untuk mengetahui masing-masing peran aktor beserta kendala, masalah atau hambatan yang terjadi dalam percepatan program peremajaan sawit rakyat yang di Kabupaten Indragiri Hilir. Aktor yang berperan sebagai informan yaitu, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Akademisi yang dalam hal ini merupakan dosen yang melakukan penelitian, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia daerah wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa dan Kelompok tani. Selain itu diketahui pula aktor yang berperan sebagai konsultan atau aktor yang memberikan solusi kepada

kelompok tani terhadap permasalahan yang kelompok tani hadapi, yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia daerah wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepala Desa Harapan Jaya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan kerjasama konteks mitra dalam percepatan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah selaku aktor yang paling dekat dengan kelompok tani agar dapat membantu kelompok tani dalam mencari mitra, hal ini dibutuhkan agar peluang ataupun percepatan program peremajaan sawit rakyat dapat berhasil dalam pengimplementasiannya. Aktor yang berperan dalam hal kerjasama yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia daerah wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, peneliti juga menemukan aktor yang berperan sebagai pengawas atau kontrol dalam percepatan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. Aktor yang berperan sebagai pengawas atau kontrol yaitu, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia daerah wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepala Desa Harapan Jaya.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat percepatan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :
 - a. Adanya keterbatasan pengetahuan oleh kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah kelompok tani yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Infrastruktur yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir dinilai belum memadai, hal ini dibuktikan dengan kelompok tani yang harus melalui sungai menggunakan perahu untuk menjual hasil perkebunan mereka. Sehingga infrastruktur yang kurang memadai dinilai dapat menjadi hambatan percepatan program PSR di Kabupaten Indragiri Hilir.
 - c. Adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh BPDPKS yang hanya sekitar 30jt/ha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z.H. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press.
- Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., Siregar, V. A., & Azhar, A. (2020). Penyuluhan Tentang Peremajaan Kelapa Sawit Dan Legalitas Lahan Di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. *Arbitrase: Journal Of Economics And Accounting*, 1(1), 1-6. Retrieved from <https://doi.org/10.31219/osf.io/57qvs>
- Asti, P. D. A., Falatehan, A. F., & Putri, E. I. K. (2022, September). Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (Studi Kasus: Kud Tunas Muda Kabupaten Siak-Riau). In *Forum Agribisnis: Agribusiness Forum* (Vol. 12, No. 2, Pp. 126-137). Retrieved from <https://doi.org/10.29244/fagb.12.126-137>
- Aulifa, M. (2019). *Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat*. Medan. Gugnuk Kabupaten 50 Kota) (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas). Retrieved from <https://www.polbangtanmedan.ac.id/upload/upload/ebook/MIFTAH%20AULIFA.pdf>
- Azhari, M. T., Al Fajri Bahri, M. P., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2021). Statistik Perkebunan Nasional 2020- 2022. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir. Retrieved from <https://perkim.id/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-indragiri-hilir/> diakses pada 14 November 2023.
- Gunawan, S. (2019). *Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Modul Pelatihan*. Instiper Press.
- HAKIM, A. L. (2019). Analisis Aktor Yang Berperan Dan Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Ruang: Studi Di Kabupaten Pandeglang. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1). Retrieved from <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1647>
- Heriyanto, H., Asrol, A., Karya, D., & Ningsih, V. Y. (2018). Analisis Faktor Produksi Kalapa Sawit Rakyat Menurut Tipologi Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Lahan Suboptimal: Journal Of Suboptimal Lands*, 7(1), 14-25. Retrieved from <https://doi.org/10.33230/JLSO.7.1.2018.366>
- Infografis Aplikasi PSR online. Retrieved from <https://www.bpdp.or.id/> Aplikasi- PSR- Online diakses pada 14 November 2023.
- Maharani, A., & Laksmono, B. S. (2021). Peran Gapoktan Karya Bersama Dalam Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Di Bandar Durian, Aek Natas, Labuhan Batu Utara. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2), 5. Retrieved from <https://doi.org/10.7454/jpm.v2i2.1022>
- Manurung, C. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi). Retrieved from <https://digilib.unila.ac.id/73542/>
- Nasution, F.A. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. *Cv. Harva Creative*.
- Nuryanto, A. (2019). Keberhasilan Dan Dampak Penerapan Sistem Informasi Desa Dalam Perspektif Actor Network Theory (Studi Kasus Di Desa Ngumbul Kabupaten Pacitan). Seminar Nasional Geotik 2019. Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/10798>
- Peta letak Kabupaten Indragiri Hilir. Retrieved from <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/01/administrasi-kabupaten-indragiri-hilir/> diakses pada 21 Desember 2023.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Prasetyo, A. D. (2022). *Analisis Peran Aktor Dalam Penentuan Strategi Penghidupan Masyarakat Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/18747/>
- Purba, J. E. A., & Marom, A. (2021). Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 547-565. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30682>
- Ramadhana, C. (2021). Strategi Pengembangan Pertanian Guna Tercapainya Ekonomi Pedesaan Berkelanjutan Melalui Sinergitas Model Penta Helix Di Desa Pettong, Kabupaten Bangkalan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(2). Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/bep/article/view/13870>
- Roshanti, D., Laili, R. N., Munif, B., & Habibitasari, B. B. (2022). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Pogram Sekardadu (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai Di Banyuwangi). *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(3), 56-70. Retrieved from <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i3.129>

- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680- 9694. Retrieved from <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1536>
- Sandy, O. F. (2020) / Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo / *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3), 415-422. Retrieved from <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.03.10>
- Sari, B. A. 2020. Analisis Peran Aktor Dalam Pengembangan Program Revitalisasi SMK Negeri 6 Semarang. Retrieved from <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprints/10420/>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Siregar, E. (2022). *Riset dan Seminar Sumber Daya Manusia*. Penerbit Widina.
- Sitompul, D., & Sadalia, I. (2020). *Strategi Peningkatan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (Csr)* Pt Austindo Nusantara Jaya Agri (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara). Retrieved from <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/27653>
- Struktur Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Retrieved from <https://disbun.inhilkab.go.id/struktur-organisasi/diakses> pada 10 November 2023.
- Subagja, D. (2018). *Gaya Komunikasi Ketua Sakamichi squad Bandung (Ssb) Dalam Meningkatkan Loyalitas Anggotanya (Studi Deskriptif mengenai Gaya Komunikasi Ketua Sakamichi Squad Bandung Dalam Meningkatkan Loyalitas Anggotanya)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia). Retrieved from <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/343/>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian,Kuantitatif Kualitatif, dan R&d Alfabeta*.
- Website/Internet**
- Wulandari, S. A., Alamsyah, Z., Napitupulu, D., & Novra, A. (2023). Strategi Pendukung Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi. *Jurnal Mea (Media Agribisnis)*, 8(1), 67-76. Retrieved from <https://doi.org/10.33087/mea.v8i1.166>
- Yuliani, F., & Sadad, A. (2022). Peran Aktor Kebijakan Pada Networking Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 317-322. Retrieved from <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8133>